



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 02 April 2020

Halaman: 9

DAMPAK CORONA

Potensi PKB Turun Drastis

BANTUL—Pemda DIY menghapuskan denda administrasi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagai respons merebaknya Covid-19. Potensi pendapatan dari sektor ini dipastikan berkurang.

Dari perkiraan pendapatan berkurang sekitar 20% hingga 21% dari target pendapatan khususnya untuk triwulan kedua 2020.

Penghitungan kehilangan potensi pajak denda PKB dan BBNKB masuk dalam penghitungan pengurangan PAD akibat Covid-10.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY Wilayah Bantul, E. Rully Marsianti, belum bisa menghitung berapa rupiah potensi pendapatan yang berkurang dari adanya penghapusan sanksi administratif PKB dan BBNKB. Saat ini jajarannya masih menghitung. Dari perkiraan pendapatan berkurang sekitar 20% hingga 21% dari target pendapatan khususnya untuk triwulan kedua 2020. "Kami memprediksi berkurang 20 sampai 21 persen dari target triwulan kedua, karena pembelian kendaraan banyak tertunda," kata Rully, Rabu (1/4).

Pada triwulan kedua tahun ini KKPD atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Bantul menargetkan pendapatan Rp42,7 miliar. Jika berkurang 21% dari jumlah target, maka pendapatan berkurang Rp8,9 miliar.

● Lebih Lengkap Halaman 12

Potensi PKB...

Selain adanya penghapusan sanksi administratif PKB dan BBNKB yang berlaku 1 April sampai 30 Juni, KPPD Bantul juga mengurangi jam operasional selama satu jam. "Biasanya sampai pukul 13.00 WIB sekarang pukul 12.00 WIB semua loket sudah selesai," kata Rully.

Akhir Januari lalu Rully menargetkan perolehan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp201 miliar dengan prediksi jumlah kendaraan di Bantul mencapai 420.000 unit untuk sepeda motor, belum termasuk kendaraan roda empat.

Untuk memaksimalkan pendapatan daerah dari pajak kendaraan pihaknya terus mempermudah layanan pembayaran pajak. Layanan pajak kendaraan bukan hanya di KPPD di Bejen, Bantul, tetapi juga di sejumlah kantor pelayanan seperti Samsat Sewon, Samsat Imogiri, Samsat Bambanglipuro, Argomulyo Sedayu, BPD Srandakan, dan BPD Piyungan.

Pajak Hotel

Wakil Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti, mengaku belum bisa memastikan potensi pajak yang hilang menyusul dihapusnya denda PKB dan BBNKB.

Menurutnya, penghitungan kehilangan potensi pajak denda PKB dan BBNKB masuk dalam penghitungan pengurangan PAD akibat Covid-19. "Paling banyak pajak hotel dan restoran. Kemungkinan rata-rata bisa mengurangi PAD 30 sampai 60 persen," katanya.

Tindak Lanjut

☐ Negatif ☐ Amat Segera ☐ Untuk Ditanggapi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005